

Pendidikan Kejuruan di Indonesia

*Oleh : Muslim
Mahasiswa Pascasarjana UPI Bandung*

A. Pengertian Pendidikan Kejuruan

Pendidikan Kejuruan menurut Rupert Evans (1978) mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu berkerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya.

Sedangkan menurut Undang – Undang No.2 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat berkerja dalam bidang tertentu. Atau yang lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yaitu : Pendidikan Menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan Pendidikan Kejuruan adalah *Pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja.*

B. Tujuan Pendidikan Kejuruan

Rupert Evans (1978) merumuskan pendidikan kejuruan bertujuan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja
- b. Meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu
- c. Mendorong motivasi untuk belajar terus.

Dalam Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 merumuskan bahwa Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.

Sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 15 UU SISDIKNAS, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa Tujuan Pendidikan Kejuruan adalah *mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja dan mengembangkan eksistensi peserta didik, untuk kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara.*

C. Model Pendidikan Kejuruan

Berdasarkan beberapa pendapat, terdapat beberapa Model Sistem Pendidikan Kejuruan :

1. *Model Pasar (Market Model)* merupakan sistem pendidikan yang merupakan tanggung jawab industri dan di jalankan sepenuhnya oleh industri. Pada model pasar pemerintah tidak terlibat dalam proses kualifikasi kejuruan. Model ini sering juga disebut Model Liberal dan langsung di arahkan pada produksi dan pasaran kerja.
2. *Model Sekolah (School Model)* adalah pendidikan dimana pemerintah berperan merencanakan, mengorganisasikan, dan memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan. Model ini sering juga disebut Model Birokratik.
3. *Model Sistem Ganda (Dual System)* Merupakan perpaduan antara model pasar dan model sekolah dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pengawas model pasar, model ini disebut juga dual system.
4. *Model Pendidikan Koperatif (Cooperative Education)*
Pendidikan kejuruan yang diselenggarakan bersama antara sekolah dan perusahaan. Terbagi dalam dua macam :
 - a. School and Enterprise, pendidikan kejuruan yang merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan industri.
 - b. Training Center and Enterprise.
5. *Informal Vocational Education.*
Sistem pendidikan yang lahir dengan sendirinya, atas inisiatif pribadi atau kelompok untuk memenuhi ketrampilan yang tidak dapat dipenuhi di pendidikan formal.

D. Fasilitas Praktek

Fasilitas Praktik Seharusnya.

Kriteria pendidikan kejuruan adalah orientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja, dalam artian lulusan pendidikan kejuruan harus mempunyai kesiapan untuk terjun dalam dunia industri. Oleh sebab itu idealnya fasilitas praktik yang ada di institusi pendidikan kejuruan harus mendukung pelaksanaan kompetensi – kompetensi yang ada dalam kurikulum sehingga target pengetahuan dan ketrampilan yang disyaratkan kurikulum dapat di laksanakan dalam pembelajaran praktik. Fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah harus selalu di perbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga lulusan pendidikan kejuruan akan selalu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri akan sangat penting dalam membantu mengembangkan ketrampilan siswa dengan fasilitas-fasilitas yang relevan yang ada di industri atau dunia kerja. Jelasnya untuk menutupi kekurangan fasilitas yang ada di sekolah, industri dapat membantu dengan memberikan kesempatan siswa belajar di industri dengan fasilitas yang relevan yang ada di industri.

Fasilitas Praktik Kenyataannya.

Fasilitas praktik yang ada di sekolah kejuruan saat ini sangat jauh dari harapan yang sesuai dengan tuntutan profil kelulusan siswa pendidikan kejuruan. Dengan kenyataan fasilitas yang ada sangat mustahil untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau industri.

Penerapan kurikulum berbasis kompetensi untuk pendidikan kejuruan sudah mulai di terapkan ke daerah – daerah di seluruh Indonesia, hal ini tidak di barengi dengan pembaharuan-pembaharuan pada fasilitas praktik yang ada terutama di daerah-daerah.

E. Keadaan Siswa, Lulusan seharusnya dan Kenyataan

Lulusan seharusnya :

Bulter (1979) menjelaskan bahwa kriteria lulusan pendidikan kejuruan secara umum harus memiliki kecakapan :

1. Minimal, pengetahuan dan ketrampilan khusus untuk jabatannya
2. Minimal, pengetahuan dan ketrampilan sosial, emosional dan fisik dalam kehidupan sosial.

3. Minimal, pengetahuan dan ketrampilan khusus dasar
4. Maksimal, kejujuran umum, sosial serta pengetahuan dan ketrampilan akademik untuk jabatan, individu dan masa depannya.

Mutu produk pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: kurikulum, tenaga kependidikan, proses pembelajaran, sarana-prasarana, alat-bahan, manajemen sekolah, lingkungan (iklim) kerja dan kerjasama industri.

Berdasarkan Kurikulum 2004 yang Berbasis Kompetensi, lulusan pendidikan kejuruan *harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang lebih mendalam dan spesifik pada bidang pekerjaan tertentu*. Siswa baru dinyatakan dapat meninggalkan sekolah apabila telah memiliki kompetensi – kompetensi yang di syaratkan dengan melalui sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau pihak industri yang berkompeten. Dengan demikian lulusan pendidikan kejuruan siap untuk memasuki dunia kerja dan mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat / dunia kerja.

Kenyataan Lulusan :

Hasil observasi empirik di lapangan mengindikasikan, bahwa sebagian besar lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sulit untuk bisa dilatih kembali, dan kurang bisa mengembangkan diri. Temuan tersebut tampaknya mengindikasi bahwa pembelajaran di SMK belum banyak menyentuh atau mengembangkan kemampuan adaptasi peserta didik. Studi itu juga memperoleh gambaran bahwa sebagian lulusan SMK tidak bisa diserap di lapangan kerja, karena kompetensi yang mereka miliki belum sesuai dengan tuntutan dunia kerja, fenomena yang terjadi pada lulusan pendidikan kejuruan adalah :

1. Pengetahuan dan ketrampilan dasar pada bidang tertentu masih lemah, sehingga kepercayaan diri dalam memasuki lapangan kerja kurang atau bahkan belum siap sama sekali.
2. Tidak mempunyai orientasi masa depan atau visi kedepan yang tidak jelas.
3. Industri tidak percaya pada kemampuan pengetahuan dan ketrampilan lulusan pendidikan kejuruan, yang seharusnya mutu lulusan pendidikan kejuruan juga merupakan tanggung jawab moral industri.

Hal tersebut di atas dapat disebabkan oleh peranan institusi pendidikan dan institusi pasangan (Industri) sebagai penyelenggara pendidikan kejuruan belum maksimal dalam menerapkan konsep kurikulum pendidikan kejuruan terutama yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada pasar kerja. Ketidaksiapan SMK sebagai penyelenggara pendidikan kejuruan dalam menghasilkan lulusan sebagaimana yang di harapkan dapat disebabkan oleh; keragaman geografis, kesiapan dan tingkat kemampuan SMK, program SMK yang belum seimbang dengan keragaman industri disekitarnya.

F. Partisipasi Industri

Seharusnya :

Peran atau keterlibatan Industri dalam pendidikan kejuruan dapat di lihat dari model pendidikan kejuruan yang di tetapkan di Indonesia, walau dalam kenyataannya tidak semua pendidikan kejuruan dapat dibuat dalam satu model seperti halnya yang terjadi di Indonesia sekarang. Sekarang ini, di Indonesia sudah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, dimana proses pembelajarannya berbasis pada pekerjaan (Work-based Learning) dan pembelajaran berbasis produksi. Kompetensi dimaksud meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas dan pekerja yang kompeten, sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh industri/dunia usaha/asosiasi profesi, jadi jelas bahwa peran *Industri sangat besar mulai dari menetapkan Standar Kompetensi, merumuskan kurikulum bersama, ikut dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan siswa prakerin dan memberikan sertifikasi serta ikut dalam uji kompetensi* sehingga lulusan pendidikan kejuruan merupakan tenaga yang siap pakai di Industri.

Kenyataan di lapangan :

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, tidak semua daerah mempunyai sumber daya yang sama, keragaman industri, ekonomi, serta kesiapan SMK apalagi di era otonomi sekarang ini. Pada tingkat pusat peran Industri mungkin sudah seperti yang diharapkan akan tetapi di daerah *Industri masih enggan untuk berhubungan dengan pendidikan kejuruan bahkan siswa prakerin pun masih mempunyai tempat yang terbatas di Industri disamping jumlah industri yang tidak seimbang dengan keragaman program yang ada di SMK..* Hal ini akan mengakibatkan lulusan pendidikan kejuruan menjadi

lebih buruk dari yang di harapkan dengan hanya mendapatkan pendidikan semu (simulasi praktik) di sekolah. Sekarang ini di daerah untuk uji kompetensi saja masih dilakukan sendiri yang seharusnya dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen sesuai dengan keahliannya atau berkerja sama dengan industri/dunia usaha.

G. Kondisi Pengetahuan yang disampaikan guru di sekolah mulai dari harapan berbasis lapangan kerja serta kenyataannya.

Harapan :

Pemelajaran berbasis kompetensi harus menganut prinsip pemelajaran tuntas (*mastery learning*) untuk dapat menguasai sikap (*attitude*), ilmu pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*) agar dapat bekerja sesuai dengan profesinya seperti yang dituntut oleh suatu kompetensi. Untuk dapat belajar secara tuntas, perlu dikembangkan prinsip pemelajaran sebagai berikut:

- 1) *Learning by doing* (belajar melalui aktivitas/kegiatan nyata, yang memberikan pengalaman belajar bermakna) yang dikembangkan menjadi pemelajaran berbasis produksi.
- 2) *Individualized learning* (pemelajaran dengan memperhatikan keunikan setiap individu) yang dilaksanakan dengan sistem modular.

Pembelajaran merupakan operasional dari kurikulum, pembelajaran di sekolah terjadi apabila terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan bahan pembelajaran adalah uraian atau deskripsi dari pokok bahasan. *Guru harus menyampaikan materi secara tuntas pada setiap kompetensi dan setelah siswa mencapai ketuntasan baru dapat dilanjutkan pada kompetensi berikutnya sesuai dengan urutan kompetensi yang di haruskan. Materi pembelajaran yang diberikan guru harus mencakup tiga aspek yaitu ; pengetahuan, ketrampilan dan sikap.* Siswa diharuskan benar-benar menguasai suatu kompetensi yang di ajarkan, hasil praktik dari pembelajaran merupakan jasa atau barang yang siap di pasarkan dan memenuhi standar industri.

Kenyataan :

Dalam memberikan materi pembelajaran di sekolah guru belum sepenuhnya menerapkan belajar tuntas, siswa belum selesai pada satu kompetensi bila waktu yang di alokasikan

sudah habis maka langsung dilanjutkan ke kompetensi yang lain. Dalam kegiatan praktik kurang memberikan kebebasan siswa dalam mengembangkan potensinya (kaku), kurang pengawasan dan hasilnya tidak memenuhi standar industri.

Hal ini disebabkan penerapan kurikulum 2004, belum sepenuhnya sekolah mensosialisasikan pada guru-guru, belum adanya pengembangan sumber daya guru mengenai kurikulum berbasis kompetensi dengan prinsip belajar tuntas.

H. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah dalam pengembangan pendidikan kejuruan di Indonesia.

Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Dikmenjur untuk pengembangan pendidikan kejuruan di Indonesia telah mengembangkan beberapa kebijakan menjelang 2020 yang di tuangkan dalam bentuk program :

1. Re- Engineering, merupakan proses penataan konsep, perencanaan dan implementasi Pendidikan Menengah Kejuruan melalui analisis potensi wilayah untuk melakukan penyesuaian peran, bidang dan program keahlian.
2. Internetisasi di lingkungan Dikmenjur
3. Model SMU Plus, SMK bersinergi dengan SMU yang memiliki sinergi akademik yang terbatas, dapat mengikuti program kejuruan yang diadakan di SMK. Pengambilan kejuruan dapat dilakukan tahun ke 2 atau ke 3 sehingga tamatan SMU yang tidak berminat melanjutkan dan keinginan untuk berkerja, telah memiliki ketrampilan tambahan.
4. Dana subsidi untuk pengembangan program pendidikan beorientasi ketrampilan hidup bagi TK/SD/SLTP/SMU/SMK.
5. Support untuk Prakerin di luar negeri, program diploma, pelatihan bahasa Inggris dan lainnya.

Salah satu peran *Pemerintah daerah* dalam pengembangan pendidikan kejuruan di daerahnya adalah membantu terlaksananya program – program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, baik itu sharing dana subsidi, pendekatan dan membuat kerjasama dengan industri dalam proses pendidikan kejuruan, menjalin kerjasama dengan industri luar negeri untuk prakerin siswa SMK, menyediakan lahan lahan untuk pengembangan Unit Sekolah Baru.

Sekolah adalah lembaga terkecil sebagai pelaksana pendidikan kejuruan, untuk mampu mengembangkan pendidikan kejuruan maka sekolah harus mampu meningkatkan sumber daya guru sebagai ujung tombak dalam pembelajaran, menjalin kerjasama dengan industri di sekitarnya, mencari dukungan operasional pada pemerintah daerah, membuat usulan pembaharuan dan perbaikan fasilitas-fasilitas praktik. Selain itu sekolah juga perlu menjalin kerja sama dengan Majelis Sekolah dalam menentukan kebijakan pembaharuan sekolah sehingga mendapat dukungan dari masyarakat.

Referensi :

- Joyonegoro, Wardiman. (1998). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui SMK*. Jakarta.
- Faisak, Amir (Kutipan). (2002). *Informasi Program Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2003*. Disampaikan oleh : Subdit Program dan KAL, Direktorat Dikmenjur Pada Rakor Dikmenjur, Di PPPG Kesenian, Yogyakarta Tanggal 8-12 Oktober 2002.
- Tim (2004). *KURIKULUM SMK EDISI 2004*. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. Jakarta.